BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bagian Perencanaan dan Program, sebagai salah satu unit di bawah Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT) di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Laporan Kinerja disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Bagian Perencanaan dan Program memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Program merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha tahun 2017.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bagian Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bagian Perencanaan dan Program adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan perencanaan serta melaksanakan penyusunan anggaran di bidang standardisasi.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program;
2. Penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program standardisasi, serta penyusunan laporan.

Struktur Bagian Perencanaan dan Program dapat dilihat pada gambar berikut.

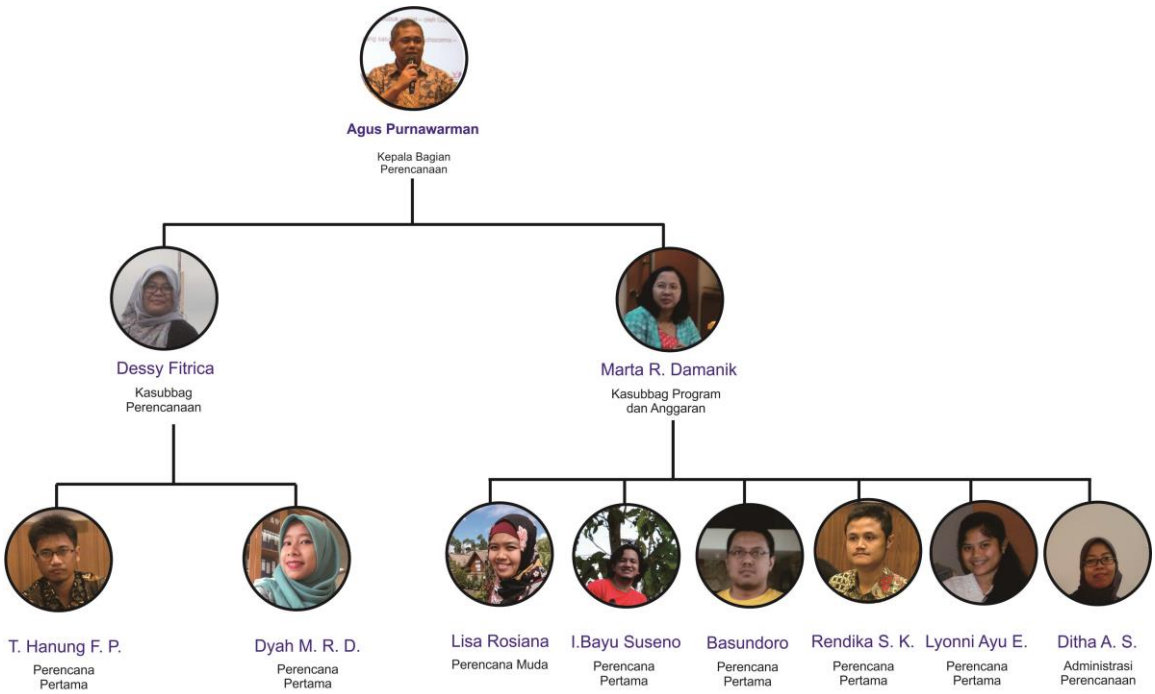

Gambar I.1
Struktur Organisasi Bagian Perencanaan dan Program

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tata kerja yang didukung oleh 2 Subbagian terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan, dengan tugas melakukan pengumpulan data dan informasi serta penyiapan penyusunan rencana dan kegiatan.
2. Subbagian Program dan Anggaran, dengan tugas melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2017 Bagian Perencanaan dan Program memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 11 (sebelas) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Bagian Perencanaan dan Program

1	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1.	**Kepala Bagian Perencanaan dan Program**			**1**	**1**
2.	**Subbagian Perencanaan**		**3**		**3**
	- Kepala Subbagian		1		1
	- JFK Perencana Pertama		2		2
3.	**Subbagian Program dan Anggaran**		**6**	**1**	**7**
	- Kepala Subbagian			1	1
	- JFK Perencana Muda		1		1
	- JFK Perencana Pertama		4		4
	- Pengadministrasi Perencanaan & Program		1		1
	Jumlah	**-**	**9**	**2**	**11**

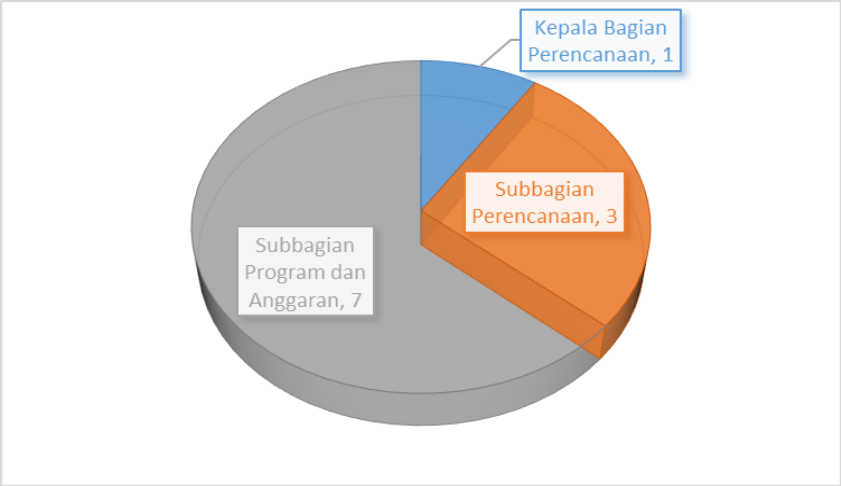

Gambar I.2
Grafik Personel ASN Bagian Perencanaan dan Program

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Biro PKT mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu dengan menjalankan peran penganggaran, pengelola keuangan, urusan ketatausahaan dan penyediaan sarana prasarana. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bagian Perencanaan dan Program telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Bagian Perencanaan dan Program

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja yang sudah mendapatkan nilai baik (B) dari KemenPANRB	▪ Anggaran kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) masih terbatas ▪ Kinerja BSN masih belum optimal dan belum terukur pencapaiannya dengan tepat	▪ Penguatan koordinasi dan sinergi dalam penyusunan program antar K/L ▪ Pengusulan penambahan anggaran melalui flagship ▪ Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Rumusan visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT) sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

"Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha yang profesional, transparan dan akuntabel"

MISI

1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, dan tata usaha untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.
2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Biro PKT telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Biro PKT adalah sebagai berikut :

TUJUAN

1. Meningkatnya kualitas layananan perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan dan rumah tangga.
2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN.

Rumusan tujuan ini telah dilakukan penyempurnaan dari tujuan yang sebelumnya tertuang dalam Renstra Biro PKT 2015-2019.

Sasaran merupakan sasaran di lingkungan Biro PKT selaku Unit Pendukung yang memberikan layanan kepada Unit Teknis di lingkungan BSN. Biro PKT dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro PKT harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2017, sasaran Biro PKT telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

SASARAN

1. Terwujudnya *good governance* dan *clean government*.
2. Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel.
3. Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel.
4. Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga.
5. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja

dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Biro PKT sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2017 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro PKT tahun 2017 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
Customer Perspectives		
1. Terwujudnya *good governance* dan *clean government*	1. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	73 (BB) Nilai
	2. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP Opini
	3. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT	3,7 Nilai
Internal Process Perspectives		
2. Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel	4. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	6 Dok
	5. Persentase pengajuan angaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif	90%
	6. Persentase penyusunan anggaran Unit Kerja yang telah Berbasis Kinerja	100%
	7. Persentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	60%
	8. Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu	Maks 4 Kali
	9. Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu	100%
3. Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel	10. Jumlah dokumen pengelolaan anggaran	7 Dok
	11. Persentase pemenuhan kriteria pengawasan keuangan negara (4 kriteria)	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
	12. Persentase realisasi anggaran BSN	≥95%
	13. Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun	11 kali
	14. Persentase rekonsilasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu	100%
	15. Persentase laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	100%
	16. Persentase realisasi target penerimaan PNBP	100%
4. Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga	17. Jumlah dokumen Tata Usaha dan Rumah Tangga	4 Dok
	18. Persentase BMN fisik yang dapat ditelusur	100%
	19. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN sesuai dengan UU 20 tahun 2014	100%
	20. Persentase penyelesaian paket pekerjaan yang dilelang	100%
Learning and Growth Perspectives		
5. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional	21. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKT yang meningkat kompetensinya	100%
	22. Realisasi anggaran PKT	≥95%
	23. Persentase pencapaian kinerja PKT	90%
	24. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100%
	25. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100%
	26. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi PKT	75%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro PKT pada tahun 2017 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Biro PKT telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2017 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2017

Sasaran		Indikator Kinerja		Target 2017
1	Terwujudnya good governance dan clean government	1	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	73 (BB) Dokumen
		2	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Bagian Perencanaan dan Program	3,7 Nilai
2	Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel	3	Jumlah Renja Bagian Perencanaan dan Program	1 Dok
		4	Jumlah draft Laporan Kinerja	3 Dok
		5	Jumlah Laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Program	1 Dok
		6	Jumlah draft Renja BSN 2018	1 Dok
		7	Jumlah draft RAKL 2018	2 Dok
		8	Jumlah draft revisi RKAKL BSN 2017	4 Dok
		9	Jumlah draft Perjanjian KInerja BSN Tahun 2017	1 Dok
		10	Jumlah laporan monev BSN tahun 2017	16 Dok
		11	Jumlah laporan pelaksanaan Rapat Kerja BSN 2017	1 Lap
		12	Jumlah draft ADIK RKAKL 2018	1 Dok
		13	Jumlah draft reviu Renstra BSN	1 Dok
		14	Jumlah draft bahan RDP Komisi VI DPR	4 Dok
		15	Jumlah draft bahan Nota Keuangan APBN 2018	1 Dok
		16	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja akhir tahun	1 kali
		17	Jumlah kajian perencanaan strategis	1 kajian
		18	Jumlah aplikasi perencanaan	2 Aplikasi
		19	Jumlah peningkatan kompetensi di	4 kali

Sasaran		Indikator Kinerja		Target 2017
3	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional		bidang perencanaan dan penganggaran	
		20	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian Perencanaan dan Program yang meningkat kompetensinya	100%
		21	Realisasi anggaran Bagian Perencanaan dan Program	≥95%
		22	Persentase pencapaian kinerja Bagian Perencanaan dan Program	90%
		23	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal Bagian Perencanaan dan Program	100%
		24	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal Bagian Perencanaan dan Program	100%
		25	Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Program	75%

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro PKT melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun rincian output dan komponen yang dihasilkan oleh Bagian Perencanaan dan Program untuk melaksanakan kegiatan di Biro PKT adalah sebagai berikut:

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BSN, melalui kegiatan :

3550 Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN, yang akan menghasilkan output yang terkait dengan Bagian Perencanaan dan Program, yaitu :

Output : **3550.952 Layanan Perencanaan**

Komponen :

051. Melaksanakan Penyusunan Rencana Program

052. Melaksanakan Penyusunan Anggaran

053. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi

054. Melakukan Penyusunan Laporan Kemajuan

055. Melakukan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro PKT berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Bagian Perencanaan dan Program melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2017.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Biro PKT, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bagian Perencanaan dan Program yang direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2017

Sasaran		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya *good governance* dan *clean government*	1	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	73 (BB) Dokumen	NA	-
		2	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Bagian Perencanaan dan Program	3,7 Nilai	NA	-
2	Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel	3	Jumlah Renja Bagian Perencanaan dan Program	1 Dok	1 Dok	100%
		4	Jumlah draft Laporan Kinerja	3 Dok	3 Dok	100%
		5	Jumlah Laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Program	1 Dok	1 Dok	100%
		6	Jumlah draft Renja BSN 2018	1 Dok	1 Dok	100%
		7	Jumlah draft RAKL 2018	2 Dok	2 Dok	100%
		8	Jumlah draft revisi RKAKL BSN 2017	4 Dok	6 Dok	50%
		9	Jumlah draft Perjanjian KInerja BSN Tahun 2017	1 Dok	1 Dok	100%
		10	Jumlah laporan monev BSN tahun 2017	16 Dok	16 Dok	100%
		11	Jumlah laporan pelaksanaan Rapat Kerja BSN 2017	1 Lap	1 Lap	100%
		12	Jumlah draft ADIK RKAKL 2018	1 Dok	1 Dok	100%
		13	Jumlah draft reviu Renstra BSN	1 Dok	1 Dok	100%
		14	Jumlah draft bahan RDP Komisi VI DPR	4 Dok	4 Dok	100%
		15	Jumlah draft bahan Nota Keuangan APBN 2018	1 Dok	1 Dok	100%
		16	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja akhir tahun	1 kali	1 kali	100%
		17	Jumlah kajian perencanaan strategis	1 kajian	1 kajian	100%
		18	Jumlah aplikasi perencanaan	2 Aplikasi	1 Aplikasi	50%
		19	Jumlah peningkatan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran	4 kali	4 kali	100%
3	Meningkatnya kinerja sistem	20	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian Perencanaan dan	100%	100%	100%

Sasaran		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian %
	pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional		Program yang meningkat kompetensinya			
		21	Realisasi anggaran Bagian Perencanaan dan Program	≥95%	99,4%	104,6%
		22	Persentase pencapaian kinerja Bagian Perencanaan dan Program	90%	84,2%	93,6%
		23	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal Bagian Perencanaan dan Program	100%	100%	100%
		24	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal Bagian Perencanaan dan Program	100%	100%	100%
		25	Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Program	75%	75%	100%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bagian Perencanaan dan Program untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	**Terwujudnya *good governance* dan *clean government***

Tabel III.xx
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
		Target	Realiasi	Capaian %		
1	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	73 (BB) Dokumen	NA	-	64,87 (BB) Dokumen	
2	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Bagian Perencanaan dan Program	3,7 Nilai	NA	-	3,2 nilai	

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terwujudnya *good governance* dan *clean government*, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu (1) Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN; dan (2) Indeks kepuasan pegawai

terhadap layanan Bagian Perencanaan dan Program. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung mengingat nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dari KemenPANRB belum keluar dan survei kepuasan layanan masih dalam proses perhitungan. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN

Tingkat kualitas akuntabilitas Kinerja BSN dinilai berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Akuntabilitas Kinerja dinilai berdasarkan 5 aspek yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Namun sampai dengan Laporan ini disusun, Kementerian PAN dan RB belum menyampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BSN tahun 2017, sehingga capaian indikator kinerja ini belum dapat diukur. Namun demikian, jika mengacu pada hasil penilaian akuntabilitas kinerja dari tahun 2012–2016 cenderung mengalami peningkatan.

Tabel III.3

Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2012 - 2016

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai			Nilai			
			2012	2013	2014	Bobot	2015	2016	2017
a.	Perencanaan Kinerja	**35**	19,69	23,04	24,18	**30**	19,92	21,37	NA
b.	Pengukuran Kinerja	**20**	10,50	11,35	11,25	**25**	15,80	16,13	NA
c.	Pelaporan Kinerja	**15**	9,36	9,63	9,78	**15**	10,28	10,36	NA
d.	Evaluasi Kinerja	**10**	5,42	6,14	6,26	**10**	5,85	5,89	NA
e.	Capaian Kinerja	**20**	13,25	12,79	13,34	**20**	12,35	11,12	NA
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**58,21**	**62,95**	**63,81**	**100**	**64,20**	**64,87**	**NA**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**CC**	**CC**	**CC**		**B**	**B**	**NA**

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN

Target : 73 (BB) Dok
Realisasi : NA

Capaian : NA

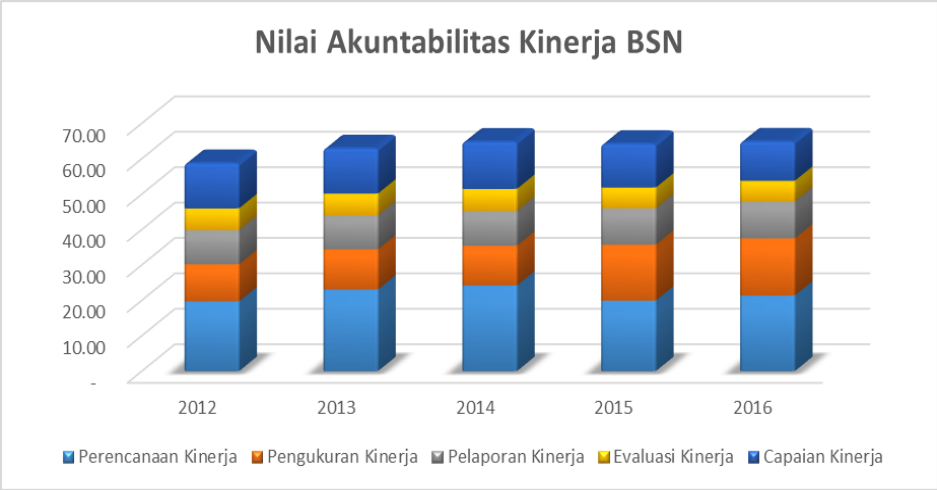

Gambar. Diagram Nilai Akuntabilitas KInerja BSN 2012 -2 016

Sebagai upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2018 akan terus dilakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP) sebagai salah satu pendukung pelaksanaan akuntabilitas kinerja BSN dan untuk melihat sejauhmana Laporan Kinerja Eselon I dan II telah mengungkapkan capaian kinerja yang telah dihasilkan selama tahun 2017 akan dilakukan sampling reviu Laporan Kinerja Eselon I dan II secara bergantian oleh Inspektorat BSN.

2. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Bagian Perencanaan dan Program

Tugas utama Bagian Perencanaan dan Program adalah memberikan layanan dalam perencanaan, anggaran dan program. Layanan tersebut harus berorientasi pada kepuasan Unit Kerja di BSN. Untuk itu dilakukan survei kepada seluruh pegawai untuk mengetahui indeks/tingkat kepuasan pegawai. Adapun aspek yang dinilai adalah:

1. Informasi terkait perencanaan
2. Alokasi anggaran per unit
3. Kemudahan penggunaan aplikasi SIPP dalam penyampaian laporan
4. Fasilitasi yang diberikan terkait revisi anggaran

Sampai dengan Laporan ini disusun, survei layanan tahun 2017 belum selesai dihitung, sehingga capaian indikator kinerja ini belum dapat diukur. Sebagai informasi, hasil survei layanan tahun 2016 menunjukkan indeks kepuasan layanan Bagian Perencanaan dan Program rata-rata sebesar 3,22 (skala 5).

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan terhadap layanan di Bagian Perencanaan dan Program akan dikembangkan Aplikasi untuk membantu proses perencanaan dan penganggaran, salah satunya dalam menu Aplikasi SIPP akan ditambahkan menu TOR dan RAB yang akan mulai diuji coba pada tahun 2018.

SASARAN 2	Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel

Tabel III.xx
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
		Target	Realiasi	Capaian %		
3	Jumlah Renja Bagian Perencanaan dan Program	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	
4	Jumlah draft Laporan Kinerja	3 Dok	3 Dok	100%	3 Dok	
5	Jumlah Laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Program	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	
6	Jumlah draft Renja BSN 2018	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	
7	Jumlah draft RKAKL 2018	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	
8	Jumlah draft revisi RKAKL BSN 2017	4 Dok	6 Dok	50%	6 Dok	
9	Jumlah draft Perjanjian KInerja BSN Tahun 2017	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	
10	Jumlah laporan monev BSN tahun 2017	16 Dok	16 Dok	100%	16 Dok	

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
		Target	Realiasi	Capaian %		
11	Jumlah laporan pelaksanaan Rapat Kerja BSN 2017	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	
12	Jumlah draft ADIK RKAKL 2018	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	
13	Jumlah draft reviu Renstra BSN	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	
14	Jumlah draft bahan RDP Komisi VI DPR	4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	
15	Jumlah draft bahan Nota Keuangan APBN 2018	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	
16	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja akhir tahun	1 kali	1 kali	100%	1 kali	
17	Jumlah kajian perencanaan strategis	1 kajian	1 kajian	100%	1 kajian	
18	Jumlah aplikasi perencanaan	2 Aplikasi	1 Aplikasi	50%	-	
19	Jumlah peningkatan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran	4 kali	4 kali	100%	-	

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 94,1%, dari capaian tersebut hanya 2 indikator kinerja yang tidak sesuai target yaitu jumlah draft revisi RKAKL BSN 2017 dan jumlah aplikasi perencanaan. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

3. Jumlah Renja Bagian Perencanaan dan Program

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Bagian Perencanaan dan Program tahun 2018 dimaksudkan sebagai gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada di Bagian Perencanaan dan Program dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Sesuai Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN tugas Bagian Perencanaan dan Program adalah melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, program, dan perencanaan serta melaksanakan penyusunan anggaran di bidang standardisasi.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi untuk menyusun rencana dan program; menyusun anggaran, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi program; serta pelaporan.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka pada tahun 2018 Bagian Perencanaan dan Program telah menyusun 1 (satu) buah dokumen Renja Bagian Perencanaan dan Program untuk mengintegrasikan rencana tindakan dalam kegiatan di Bagian Perencanaan dan Program, sehingga capaian indikator kinerja tahun 2017 sebesar 100%.

Tabel III.xx
Renja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2018

Kode	Output/Komponen	Pagu 2018
3550.952	**Layanan Perencanaan**	**2,319,411,000**
51	Melaksanakan Penyusunan Rencana Program	803,021,000
52	Melaksanakan Penyusunan Anggaran	656,315,000
53	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi	712,968,000
55	Melakukan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja (Laporan Kinerja)	147,107,000

Renja merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu K/L sebagai penjabaran dari Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Pada tahun 2017, Bagian Perencanaan dan Program menyusun 1 (satu) Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2018. Sejak tahun 2017, penyusunan Rencana Kerja (Renja) suatu K/L adalah berbasis aplikasi yang terintegrasi yaitu KRISNA dari Bappenas.

- Sesuai dengan target yang diharapkan, Bagian Perencanaan dan Program berhasil menyusun 1 (satu) dokumen Rencana Kerja (Renja) Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2018.

- Penyusunan 1 (satu) dokumen Rencana Kerja (Renja) Bagian Perencanaan dan Program ini berhasil dilakukan100% karena didukung oleh terlaksananya tahapan-tahapan penyusunan dokumen dengan baik dan lancar.
- Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bagian Perencanaan dan Program menggunakan

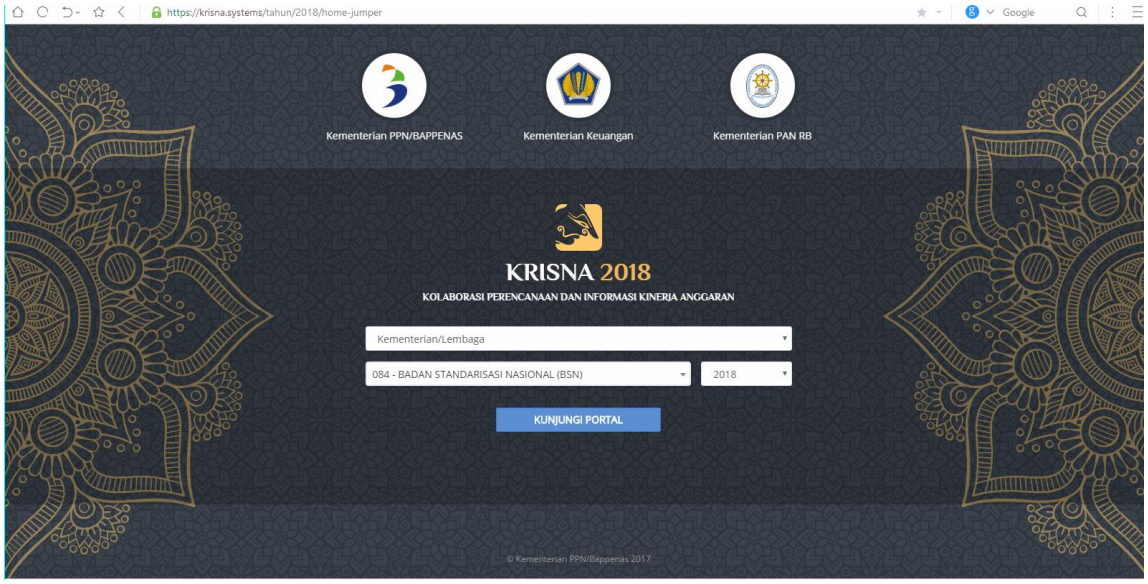

4. Jumlah draft Laporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jumlah draft Laporan Kinerja
Target : 3 Dok Realisasi : 3 Dok
Capaian : 100%

Pada tahun 2017, Bagian Perencanaan dan Program telah berhasil menyiapkan 3 (tiga) draft

Laporan Kinerja Tahun 2016 yang disusun secara berjenjang mulai dari penyusunan draft Laporan Kinerja Biro PKT, draft Laporan Kinerja Sekretaris Utama, dan terakhir draft Laporan Kinerja BSN, sehingga capaian indikator kinerja adalah sebesar 100%.

Dalam rangka penyusunan draft Laporan Kinerja tersebut Bagian Perencanaan dan Program melakukan koordinasi dengan Tim AKIP untuk penyusunan Laporan Kinerja BSN, sedangkan untuk penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama.

Pada tahun 2017, Bagian Perencanaan dan Program telah menghasilkan 3 (tiga) draft laporan kinerja, yaitu: draft laporan kinerja BSN, draft laporan kinerja eselon I (Sestama), dan draft laporan kinerja eselon II (Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha). Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah Pada Tahun 2017. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam dalam mencermati berbagai permasalaham sebagai bahan acuan dalam menyusun rencana kinerja di tahun berikutnya.

- Capaian kinerja yang dicapai untuk jumlah draft laporan kinerja adalah 100%, dikarenakan realisasi sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 3 (tiga) draft laporan kinerja, antara lain: draft laporan kinerja BSN, draft laporan kinerja eselon I (Sestama), dan draft laporan kinerja eselon II (Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha).
- Keberhasilan Capaian 100% terhadap jumlah draft laporan kinerja ini dikarenakan oleh ketepan waktu setiap bagian/unit kerja mengumpulkan laporan kinerja bagian/unit kerja masing-masing untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai draft laporan kinerja untuk eselon II dan eselon I, serta draft laporan kinerja BSN Tahun 2016.

5. Jumlah Laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Program

Mulai tahun 2017, seluruh Unit Kerja Eselon III di lingkungan BSN menyusun Laporan Kinerja Tahun 2016. Bagian Perencanaan dan Program telah telah berhasil menyusun 1 (satu) dokumen Laporan Kinerja Tahun 2016 yang merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Bagian Perencanaan. Mengingat pada tahun 2017 Bagian Perencanaan dan Program belum menetapkan Perjanjian Kinerja sendiri, maka capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja tersebut merupakan bagian dari Indikator Kinerja Biro PKT yang terkait dengan Bagian Perencanaan dan Program.

Pada Tahun 2017, Bagian Perencanaan dan Program telah menghasilkan 1 (satu) dokumen Laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2016. Laporan Kinerja eselon III (Bagian Perencanaan dan Program) ini akan menjadi masukan dalam penyusunan draft laporan kinerja eselon II (Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha).

- Capaian kinerja untuk jumlah laporan kinerja Bagian Perencanaan dan Program adalah 100%. Dalam perjanjian kinerjanya, Bagian

pereancanaan dan program menargetkan 1 (satu) dokumen laporan kinerja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2016. Dan pada tahun 2017, Bagian Perencanaan dan Program berhasil menyusun 1 (satu) dokumen laporan kinerja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2016.

- Keberhasilan capaian ini dapat tercapai dikarenakan oleh kecepatan dan ketepatan para personel Bagian perencanaan dan program dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam menyusun draft laporan kinerja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2016 tersebut.

6. Jumlah draft Renja BSN 2018

Renja merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu K/L sebagai penjabaran dari Renstra K/Lyang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Rencana Kerja (Renja) BSN disusun secara komprehensif di Aplikasi Kolaborasi Informasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran (KRISNA). Hasil dari aplikasi tersebut maka telah tersusun **1 Dokumen Rencana Kerja BSN 2018** yang meliputi Rencana Kerja BSN, Eselon I dan Eselon II serta dokumen hasil trilateral meeting. Setiap tahunnya BSN menghasilkan 1 dokumen Renja BSN.

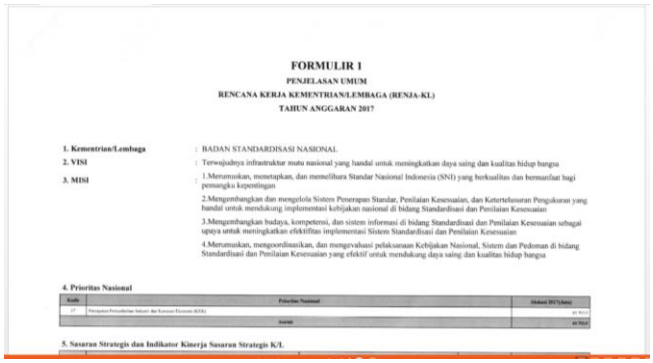

FORMULIR 1
PENJELASAN UMUM
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Kementrian/Lembaga : BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2. VISI : Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa
3. MISI :
1.Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan
2.Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
3.Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
4.Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Nasional, Sistem dan Pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa

4. Prioritas Nasional

Kode	Prioritas Nasional	Alokasi 2017 (Juta)
17	Pengaturan Perindustrian Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	xx.xxx
	Jumlah	xx.xxx

5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L

Rangkaian tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyusunan Renja BSN dimulai dari :

- Penyampaian usulan anggaran 2017 dari seluruh Unit Kerja yang berupa TOR dan RAB (proposal awal) di awal tahun 2016 untuk kepentingan penyusunan reviu *baseline* anggaran BSN tahun 2017, sebelum turun pagu indikatif 2017.
- Penyampaian reviu *baseline* anggaran BSN tahun 2017 kepada Kemenkeu tanggal 5 Februari 2016 sebesar Rp.312.070.602,000-.
- Hasil reviu baseline anggaran BSN tahun 2017 setelah pembahasan dengan Kemenkeu adalah sebesar Rp.289.169.366,000-.
- Multilateral Meeting I dan II antara Bappenas dengan seluruh K/L dan Pemda yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari s/d 1 Maret dan 14 s/d 18 April 2016 dalam rangka penyusunan rancangan RKP 2017.
- Bilateral Meeting I dan II antara Bappenas dengan K/L di lingkungan Ristekdikti yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 dan 19 April 2016 untuk membahas Program dan Kegiatan K/L yang masuk ke dalam Prioritas Nasional 2017 dan sebagai tindaklanjut dari pertemuan Multilateral Meeting.
- Trilateral Meeting antara BSN, Kemenkeu dan Bappenas tanggal 9 Mei 2016
- Terbit SEB Kemenkeu dan Bappenas tentang RKP 2017 dan Pagu Indikatif TA 2017, pagu BSN sebesar Rp.184.522.097.000,-

- ✓ Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BSN, sebesar Rp.102.985.602.000,- dan
- ✓ Program Pengembangan Standardisasi Nasional, sebesar Rp.81.536.495.000,-

- Penyampaian Rumusan Kerja K/L 2017 melalui Aplikasi ADIK TA.2017 dan Penelaahan ADIK BSN TA 2017 tanggal 7 Juni 2016
- Penyampaian Renja BSN TA 2017 tanggal 30 Mei 2016 dan penyampaian kembali Renja BSN TA 2017 untuk menyesuaikan dengan Pagu Indikatif tanggal 24 Juni 2016

Bilateral Meeting BSN dan Bappenas

Bilateral Meeting BSN dan Kemenkeu

7. Jumlah draft RKAKL 2018

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renja K/L dan Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

Di tahun 2017, telah dihasilkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen RKA BSN tahun 2018 dan penetapan DIPA BSN tahun 2018. Pagu Anggaran BSN tahun 2018 sebesar Rp. 182.466.697.000,-

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Pertama

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : SP DIPA- 004.01.1.611104/2018

A. Dasar Hukum :
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (006) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2. Unit Organisasi : (01) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
3. Program : (01) DKI JAKARTA
4. Kodefikasi Satker : (813104) SEKRETARIAT UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Sebesar : Rp. 182.466.697.000 (SERATUS DELAPAN PULUH DUA MILIAR EMPAT RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.10 UTSWING EKONOMI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Bersasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 115.532.003.000
2. PNBP
PNBP Tk Berjalan Rp. 19.933.694.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
- Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
6. SBSN-PBS Rp. 66.000.000.000
(133) Rp. 182.466.697.000

D. Pencairan dana dibatasan maksi :
1. KPPN JAKARTA IV

E. Persyaratan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer):
1. DIPA Pertama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Pertama ini disiasi secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengamat berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (Identifikasi).
3. DIPA Pertama berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengambilan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA dibs sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Pertama sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pertama dengan database RKA-K/L,DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang tertdapat di dalam database RKA-K/L,DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Pertama berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd
ASKOLANI
NIP. 196809111992031001

Term of References (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Unit Kerja sebagai dasar penyusunan RKA sebelumnya telah

dilakukan penelitian oleh Biro PKT dan di reviu oleh Inspektorat.

Mulai tahun 2017 seluruh K/L diminta untuk melakukan penataan nomenklatur kinerja dengan menggunakan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Mengingat BSN masih terus melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka pada tahun 2017 telah dilakukan kembali penataan nomenklatur kinerja BSN dalam rangka penyusunan RKA 2018.

8. Jumlah Draft Revisi RKAKL BSN 2017

Pada tahun 2017, bagian perencanaan menargetkan untuk draft revisi RKAKL BSN 2017 adalah 4 kali baik itu kebijakan BSN ataupun kebijakan pemerintah seperti penghematan ataupun kebijakan lainnya. Bagian perencanaan mempunyai harapan dengan 4 kali revisi RKAKL di tahun 2017, diharapkan unit kerja dalam melakukan kegiatan memang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Dalam tahun 2017 ternayata terdapat 6 kali revisi RKAKL BSN 2017. Ini melebihi dari target yang sudah ditentukan oleh bagian perencanaan sebanyak 4 kali. Adapun jenis revisi tersebut adalah

- Revisi 1 tanggal 15 Maret 2017

  Revisi 1 merupakan revisi terjadwal. Pada revisi ini terjadi perpindahan MAK Belanja, perubahan pada Hal. III DIPA BSN.

- Revisi 2 tanggal 1 Agustus 2017

  Revisi ke 2 adalah revisi yang diakibatkan adanya Inpres no.4 tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 mengenai efisiensi belanja barang, dan Badan Standardisasi Nasional harus menghemat sebesar 20 Milyar Rupiah. Dan pada tahap ini, BSN harus melakukan self blokir terlebih dahulu, agar terlihat penajaman prioritas pelaksanaan anggaran. Dan self blokir akan tercantum di hal. 4 DIPA BSN

- Revisi 3 tanggal 18 Agustus 2017

Revisi ini merupakan revisi lanjutan dari revisi sebelumnya (revisi 2)yaitu revisi menghilangkan anggaran yang dibintang (diblokir), dan untuk menghapus catatan pada hal. 4 DIPA BSN. Dengan adanya revisi ini, maka PAGU BSN akan berkurang sebesar 20 Milyar rupiah, yang semula Rp. 184.522.097.000 menjadi Rp. 164.522.097.000

- Revisi 4 tanggal 6 September 2017

  Revisi ke 4 adalah revisi hasil kebijakan pimpinan BSN, karna pada revisi ini ada pemindahan pagu dari kegiatan 3554 sebesar 4 milyar yang di gunakan dalam kegiatan yang lebih prioritas. Pada revisi ini juga pindah MAK Belanja, pindah pagu anggaran dan juga revisi hal.3 DIPA BSN.

- Revisi 5 tanggal 14 November 2017

  Penerimaan PNBP untuk keseluruhan BSN sudah melebihi target, sehingga penggunaan pagu BSN sebesar 88% dari penerimaan harus di revisi yang berakibat pada penambahan pagu BSN yang sebelumnya Rp. 164.522.097.000 menjadi Rp. 165.504.554.000 yang seluruhnya penambahan pagu dari PNBP dan digunakan untu kegiatan PNBP. Pagu PNBP boleh digunakan oleh BSN yang sebelumnya adalah Rp. 13.316.695.000 menjadi Rp. 14.299.152.000

- Revisi 6 tanggal 30 Desember 2017

  Revisi ini dilakukan berdasarkan perdirjen PB no. 3 tahun 2017. Setiap K/L di haruskan untuk melakukan revisi POK apabila ada revisi internal yang menjadi kewenangan KPA. Sehingga pada akhir desember 2017, BSN melakukan revisi POK yang menjadi kewenangan KPA ke Kanwil Perebendaharaan Jakarta, dan memunculkan DIPA baru, walaupun tidak ada perubahan sama sekali di dalam DIPA tersebut.

Tabel III.7
Revisi Anggaran (DIPA) BSN Tahun 2016

Dalam rupiah

Uraian	Anggaran	Tgl Pengesahan	Keterangan
DIPA Awal	Rp 184.522.097.000	6 Desember 2017	
DIPA Revisi 1	Rp 184.522.097.000	15 Maret 2017	perpindahan MAK Belanja
DIPA Revisi 2	Rp 184.522.097.000	1 Agustus 2017	self blokir adanya Inpres no.4 tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 mengenai efisiensi belanja barang
DIPA Revisi 3	Rp 164.522.097.000	18 Agustus 2017	Penghematan adanya Inpres no.4 tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 mengenai efisiensi belanja barang
DIPA Revisi 4	Rp 164.522.097.000	6 September 2017	pemindahan pagu kegiatan
DIPA Revisi 5	Rp. 165.504.554.000	14 November 2017	penambahan pagu BSN
DIPA Revisi 6	Rp. 165.504.554.000	30 Desember 2017	perdirjen PB no. 3 tahun 2017

9. Jumlah draft Perjanjian KInerja BSN Tahun 2017

Perjanjian Kinerja 2017 merupakan kontrak kerja pejabat struktural yang akan dilaksanakan di Tahun 2017. Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Kedeputian/Kesestamaan masing-masing dirumuskan secara berjenjang (cascading). Perjanjian Kinerja BSN terdiri dari Perjanjian Kinerja Lembaga, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV. Perjanjian Kinerja Lembaga, Eselon I dan Eselon II ditandatangani pada saat Rapat Kerja BSN 2017 di Bogor, sementara Perjanjian Kinerja Eselon III dan Eselon IV ditandatangani di masing – masing unit kerja.

10. Jumlah laporan monev BSN tahun 2017

- Target dokumen laporan monitoring dan evaluasi BSN pada Tahun 2017 yaitu 16 dokumen laporan terdiri dari 4 laporan monitoring dan evaluasi BSN berdasarkan peraturan PP 39 Tahun 2o16 Triwulan I,II,III,IV, 12 dokumen laporan monitoring dan evaluasi Kegiatan BSN dalam 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember . Realisasi dokumen laporan monitoring dan evaluasi BSN pada Tahun 2017 yaitu 16 dokumen laporan artinya tercapai sebesar 100%. Realisasi kinerja tahun ini yaitu 16 dokumen laporan monitoring dibandingkan tahun sebelumnya 16 dokumen yaitu sebesar 100%.
- Sumber daya Manusia yang membantu dalam penyusunan laporan monev BSN Tahun 2017 sebanyak 10 orang dari Bagian Perencanaan dan Program artinya terdapat pengurangan 2 orang dari tahun 2016 yaitu sebanyak 12 orang. Pengurangan 2 orang tersebut karena 1 orang telah mutasi ke daerah dan 1 orang ditugaskan di KLT Palembang. Akibat pengurangan orang tersebut menyebabkan penyusunan laporan monev membutuhkan waktu yang lebih lama walaupun diusahakan tepat waktu.

11. Indikator Kinerja : Jumlah laporan pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) BSN 2017

Rapat Kerja BSN 2017 yang bertema "MEMANTAPKAN KINERJA STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN telah dilakukan di Bogor pada 8 – 9 Februari 2017. Rapat kerja ini dibuka oleh Kepala BSN, Bambang Prasetya, dan dihadiri oleh para pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Esselon IV, Kepala Sekretariat Unit Korpri BSN, Pejabat Fungsional Senior, serta Staf Perwakilan Pusat Perumusan Standar di lingkungan BSN. **Hasil laporan pelaksanaan rapat kerja BSN 2017 termuat dalam 1 laporan yang memuat Risalah Hasil Rapat Kerja, Rumusan Hasil Rapat Kerja, Materi Paparan Rapat Kerja dan Dokumentasi Rapat Kerja.** Pada 2016 juga menghasilkan 1 laporan pelaksanaan Raker BSN

Gbr. Laporan Raker BSN 2017

Dalam pelaksanaan Raker BSN Tahun 2017 telah dilakukan : evaluasi hasil Raker BSN Tahun 2016; rencana aksi perbaikan akuntabilitas kinerja; pengelolaan kinerja dan anggaran, pengelolaan media social; penandatanganan perjanjian kinerja; penghargaan kinerja terbaik; penetapan sektor prioritas; pembentukan kantor layanan teknis; koordinasi kegiatan di daerah; pilot project pembinaan UMKM; strategi terkait kelembagaan, brand image BSN-SNI, sistem informasi SPK dan hotline service; pemenuhan sarana prasarana; serta tindak lanjut birokrasi dan pengembangan SDM. H ıkung oleh seluruh personel BSN dengan menjaga ritme dan perkembangan yang berkelanjutan terhadap kinerja saat ini. Dalam raker tersebut menghadirkan 2 (dua) pembicara dari eksternal BSN yaitu Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja KKP yang memaparkan mengenai strategi dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penggunaan anggaran da untuk memaksimalkan kinerja. Selain itu hadir pula Tenaga Ahli dari Kantor Staf Keprisedanan dan Kepala Bagian DispenAU yang memaparkan tentang pengelolaan media social lembaga pemerintah

Gambar. Rapat Kerja BSN 2017

12. Jumlah draft ADIK RKAKL 2018

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) adalah dokumen perencanaandan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renja K/L dan Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada tahun 2017, dokumen Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) RKAKL sudah tidak digunakan karena telah digabungkan ke dokumen Rencana Kerja (RENJA) di aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) sehingga perencanaan dan anggaran telah dikomprehensifkan di dalam satu dokumen. Jumlah yang dihasilkan yaitu 1 (satu) draft RENJA BSN 2018. Alamat aplikasi yang digunakan untuk menginput perencanaan dan penganggaran yaitu krisna.bappenas.go.id

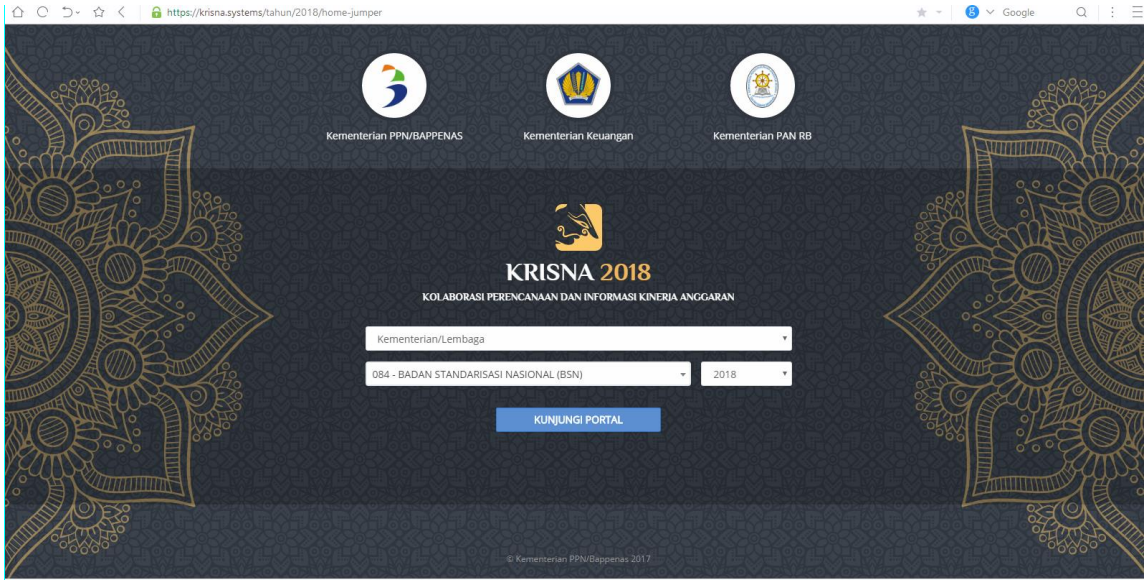

Gambar. Tampilan beranda aplikasi KRISNA

13. Jumlah draft reviu Renstra/IKU BSN

Reviu Renstra BSN termasuk reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan seluruh Ess I dan II dilakukan untuk mengevaluasi implementasi Renstra/IKU dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ke depan. Salah satu masukan penting untuk menyempurnakan Renstra/IKU ini adalah hasil evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN RB. Perubahan tersebut menghasilkan 1 dokumen Keputusan Kepala BSN No.16A/KEP/BSN/2/2017 tentangPerubahan Ketiga atas Keputusan Kepala BSN No.28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional

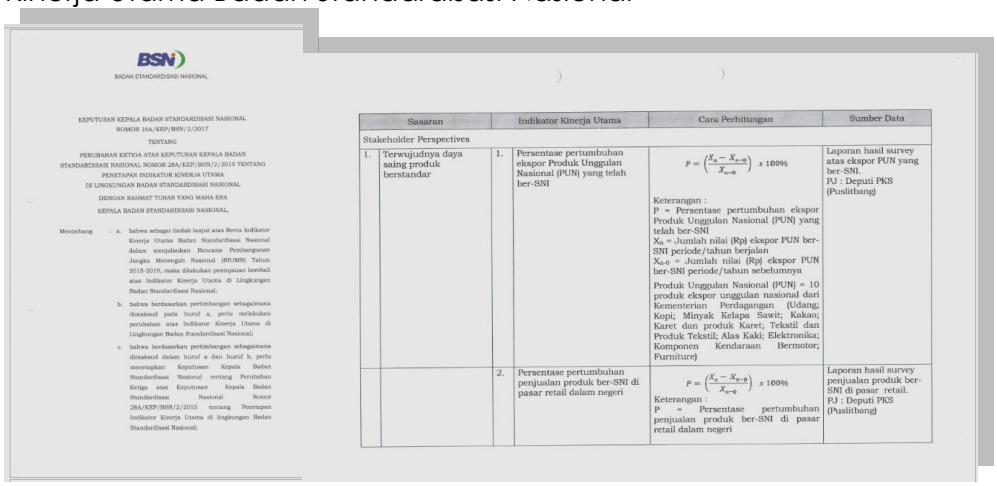

BSN
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 16A/KEP/BSN/2/2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28A/KEP/BSN/2/2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas Reviu Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, maka dilakukan peninjauan kembali atas Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan atas Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28A/KEP/BSN/2/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

	Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
Stakeholder Perspectives					
1.	Terwujudnya daya saing produk berstandar	1.	Persentase pertumbuhan ekspor Produk Unggulan Nasional (PUN) yang telah ber-SNI	$P = \left(\frac{X_n - X_{n-0}}{X_{n-0}}\right) x\ 100\%$ Keterangan : P = Persentase pertumbuhan ekspor Produk Unggulan Nasional (PUN) yang telah ber-SNI X_n = Jumlah nilai (Rp) ekspor PUN ber-SNI periode/tahun berjalan X_{n-0} = Jumlah nilai (Rp) ekspor PUN ber-SNI periode/tahun sebelumnya Produk Unggulan Nasional (PUN) = 10 produk ekspor unggulan nasional dari Kementerian Perdagangan (Udang; Kopi; Minyak Kelapa Sawit; Kakao; Karet dan produk Karet; Tekstil dan Produk Tekstil; Alas Kaki; Elektronika; Komponen Kendaraan Bermotor; Furniture)	Laporan hasil survey atas ekspor PUN yang ber-SNI. PJ : Deputi PKS (Puslitbang)
		2.	Persentase pertumbuhan penjualan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	$P = \left(\frac{X_n - X_{n-0}}{X_{n-0}}\right) x\ 100\%$ Keterangan : P = Persentase pertumbuhan penjualan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	Laporan hasil survey penjualan produk ber-SNI di pasar retail. PJ : Deputi PKS (Puslitbang)

Jumlah draft bahan RDP Komisi VI DPR

Sesuai peraturan perundangan, bahwa Penyusunan Rancangan UU APBN dilakukan bersama antara pemerintah dengan DPR. Pembahasan RUU APBN tersebut dilakukan Kementerian/Lembaga dengan komisi terkait. BSN melakukan pembahasan anggaran terkait program, kegiatan dan anggaran bersama dengan Komisi VI DPR-RI selaku Komisi yang membawahi bidang ekonomi. Bagian Perencanaan sesuai dengan tugasnya menyiapkan bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyusunan anggaran BSN. Pada tahun 2017, BSN melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR sebanyak 9 kali. Pelaksanaan tahun 2017 lebih banyak dari yang ditargetkan, yaitu sebanyak 4 kali. Adapun pembahasan RDP yang dilakukan sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembahasan
1	13 Februari 2017	1. Evaluasi Pelaksanaan APBN 2016 2. Rencana Kegiatan Tahun 2017
2	11 Juli 2017	1. Pembahasan RKA-KL dan RKP 2018 2. Pembahasan RKAKL UU APBNP 2017 3. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
3	25 Juli	Perubahan alokasi anggaran 2017
4	4 September	RKAKL 2018
5	7 September (Fairmont hotel)	Rincian RKAKL 2018
6	13 September	Persetujuan RKAKL 2018
7	2 Oktober (Hotel Mulia)	FGD Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
8	16 Oktober	Penyesuaian RKAKL 2018, hasil Banggar
9	18 Oktober	Penyegelan Gula yang disebabkan Penerapan SNI oleh PTPN IX

Dalam penyusunan draft bahan RDP, terkendala akan jadwal atau undangan yang diterima BSN dari Komisi VI DPR. Pembahasan dijadwalkan secara mendadak yang membuat terbatasnya waktu untuk menyiapkan dan pembahasan terkait pertanyaan yang diajukan oleh Komisi VI DPR RI tersebut. Untuk itu, selama ini dalam penyusunan draft bahan RDP tersebut dilakukan dengan koordinasi melalui media elektronik.]

RDP dengan DPR membahas mengenai program, kegiatan dan anggaran yang ada, baik realisasi tahun 2016, perubahan anggaran tahun 2017 dan rencana kerja tahun 2018. Selain membahas terkait anggaran, tahun 2017 juga dilaksanakan pembahasan terkait SNI Gula dan penerapannya.

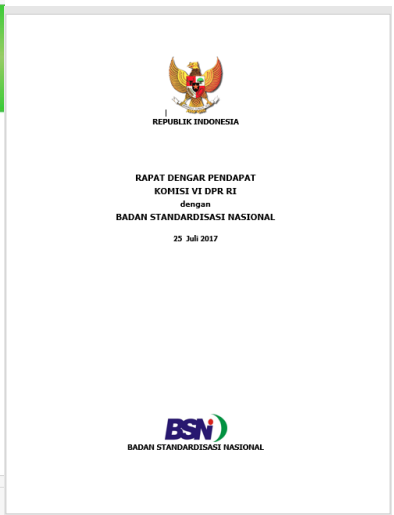

Pembahasan tahun 2017 lebih banyak bila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 yaitu sebanyak 8 kali pertahun. Perbedaan jumlah RDP setiap tahun menyesuaikan dengan jadwal dari kebutuhan pembahasan yang diminta oleh DPR. RDP BSN dengan Komisi VI BSN selama tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat pada grafik berikut :

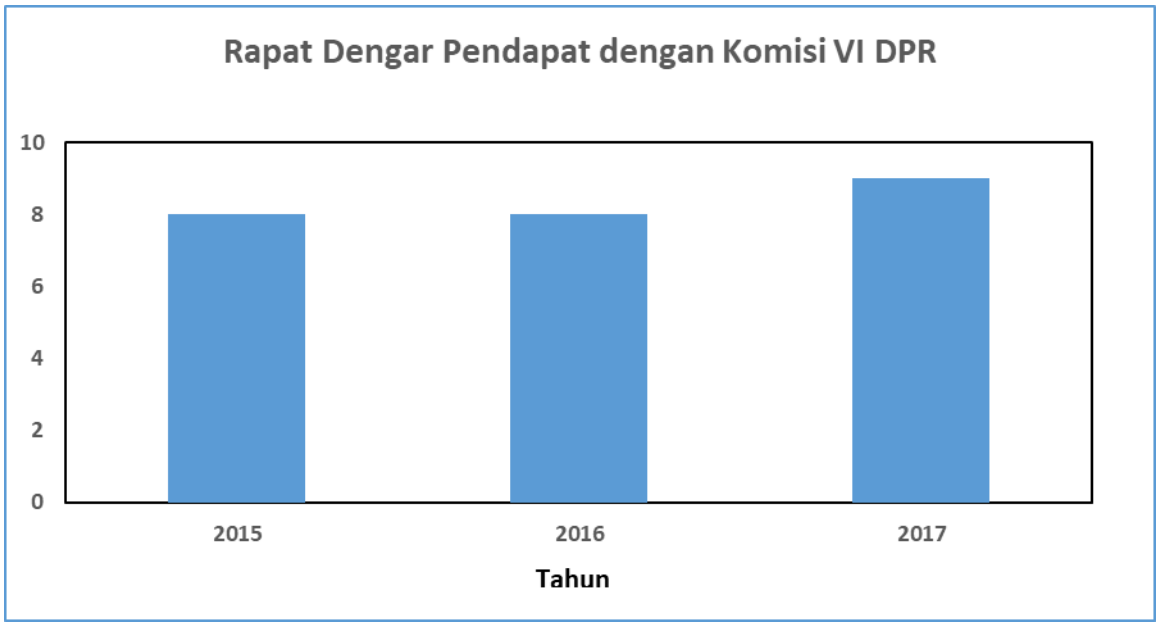

14. Jumlah draft bahan Nota Keuangan APBN 2018

Sebagai bagian dalam UU APBN, Nota Keuangan juga disusun setiap tahunnya. BSN selaku LPNK diminta untuk menyusun bahan untuk nota keuangan APBN TA 2018 terkait tusi BSN. Penyusunan masukan Nota Keuangan BSN dilakukan oleh Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha, Cq bagian Perencanaan dan Program. Penyusunan masukan nota keuangan BSN, dilakukan dengan

meminta usulan dari unit kerja. Namun sampai dengan waktu yang dibutuhkan, unit kerja belum menyampaikan usulan terhadap masukan tersebut. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan nota keuangan tersebut. Untuk itu, tindak lanjut yang diperlukan untuk penyusunan masukan nota keuangan di masa mendatang adalah adanya tim khusus perwakilan unit kerja yang paham mengenai kegiatan terkait tusinya.

15. Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja akhir tahun

Target pelaksanaan evaluasi kinerja pada akhir tahun yaitu 1 kali. Realisasi pelaksanaan evaluasi kinerja sebanyak 1 kali di Yogyakarta. Artinya capaian indikator kinerja ini sebesar 100 %. Kegiatan evaluasi kinerja membahas tentang target dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan maupun Indikator Kinerja Utama serta kendala atau permasalahan yang dihadapi sekaligus hal-hal yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Evaluasi kinerja BSN pada akhir tahun selalu dilaksanakan sebanyak 1 kali di tahun 2016 dan 2017 artinya capaian 2017 dibandingkan 2016 sebesar 100 %.

16. Jumlah kajian perencanaan strategis

Kajian Perencanaan yang telah dilakukan oleh Bagian Perencanaan memuat 2 kajian yaitu tentang Potensi Daerah dalam Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Kajian Perencanaan Strategis Pengembangan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU).

Kajian Potensi Daerah dalam Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan penyediaan informasi geospasial untuk pengembangan standarisasi dan penilaian kesesuaian, sebagai wujud tindak lanjut Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019. Kajian tersebut memuat potensi – potensi di sector primer antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan energy pada setiap Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat memuat potensi setiap Kabupaten/Kota untuk dilakukan analisis kebutuhan SNI dan LPK yang potensial.

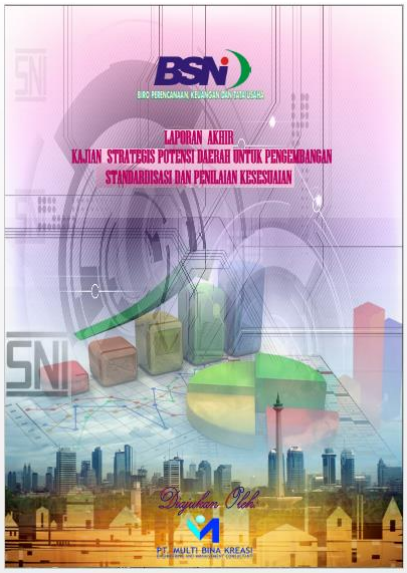

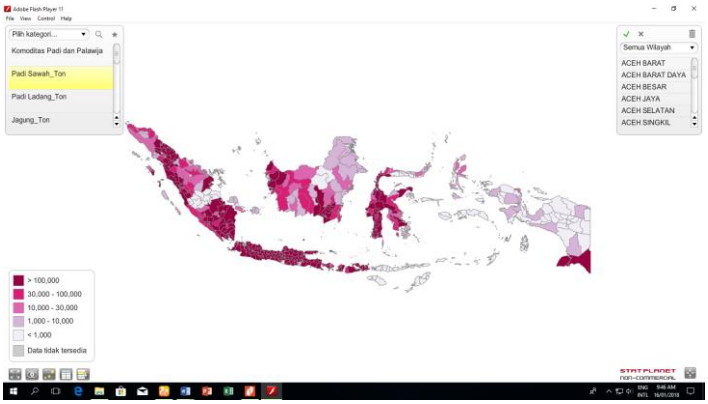

Sehingga kebijakan yang disusun oleh BSN menjadi lebih mendukung sesuai dengan potensi daerahnya. **Tersusun 1 Dokumen Laporan Kajian.**

Kemudian kajian yang kedua adalah kajian perencanaan strategis pengembangan laboratorium SNSU di Serpong. Laboratorium SNSU ini dibangun karena belum adanya alat acuan untuk menentukan standar ukuran dan memberikan jaminan ketertelusuran terhadap hasil pengukuran khususnya di bidang alat kesehatan dan mikrobiologi di Indonesia. Selain itu, UU No. 20 Tahun 2014 diamanahkan kepada BSN bekerja sama dengan Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya berdasarkan kompetensi teknisnya, perlu memelihara dan memperbaharui infrastruktur pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran untuk memfasilitasi peningkatan daya saing sektor produksi dimana kegiatannya difokuskan kepada pembangunan fasilitas metrologi biologi dan pendukungnya serta memfasilitasi pengembangan laboratorium acuan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kalibrasi dan pengujian Peralatan Kesehatan Diharapkan dengan adanya laboratorium ini, para pemilik Lembaga Penguji produk – produk tersebut tidak perlu menkalibrasikan alat uji mereka di luar negeri. **Tersusun 1 Dokumen Laporan Kajian**

17. Jumlah aplikasi perencanaan

Jumlah aplikasi perencanaan yang di targetkan oleh bagian perencanaan sebanyak 2 aplikasi, yaitu :

- Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan)

  Aplikasi SIPP ini bertujuan untuk memudahkan unit kerja dalam penganggaran dan pelaporan, karna segala jenis informasi mengenai perencanaan dan pelaporan akan disajikan di aplikasi ini, sehingga unit kerja sudah tidak akan kesulitan dalam mencari data dan harus mengacu kemana dalam hal penganggaran dan pelaporan. Dalam hal penganggaran, aplikasi ini akan menyajikan data anggaran dan juga realisasi secara updat. Sedangkan untuk pelaporan, yang semula pelaporan ini berupa hard copy dan harus menunggu pimpinan kembali ke kantor untuk di seyujui, maka melalui aplikasi ini cukup melalui gadget untuk membaca laporan unit kerja nya dan untuk menyetujui nya pun bisa melalui gadget tersebut. Pada pengembangan aplikasi SIPP juga telah dapat digunakan untuk membuat Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) secara terstruktur sehingga templatenya akan sama dan memudahkan dalam pengisian oleh unit kerja.

- Aplikasi SIG (Sistem Informasi Geospasial)

  Aplikasi berbasis pemetaan inilah yang akan menjadi salah satu tolok ukur dalam hal pengambil keputusan, baik keputusan kota mana yang belum di lakukan sosialisasi, MoU, pembinaan UKM nya, penguatan LPK nya, uji petiknya, dan sebagainya. Dengan aplikasi ini pula pengambilan keputusan bahwa salah satu kegiatan unit kerja apakah dapat melakukan kegiatan tersebut masih relevan atau tidak. Sehinggga SIG merupakan elemen penting dalam pengambilan keputusan.

  Namun sampai dengan penghujung tahun 2017, jumlah aplikasi yang diselesaikan oleh bagian perencanaan dan program hanya 1 aplikasi yaitu aplikasi SIPP, ini dikarenakan adanya penghematan anggaran di tahun

2017 pada bulan Agustus 2017. Dan aplikasi SIG tidak di lakukan pembangunannya, karena selain terkena penghematan, ternyata ada unit kerja lain yang membuat pemetaan juga walaupun dalam lingkup yang sangat kecil hanya data LPK saja dan itu hanya berupa penyajian data (matriks).

18. Jumlah peningkatan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran

Meningkatkan kemampuan pegawai dapat memberikan dampak positif bagi lembaga dengan kontribusi yang optimal dapat meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga. Beberapa kegiatan peningkatan kompetensi ASN di Bagian Perencanaan dan Program antara lain pelatihan, workshop, seminar atau knowledge sharing. Seluruh ASN di Bagian Perencanaan dan Program telah memperoleh pelatihan dengan rincian terlampir. Dengan jumlah 4 kali mengikuti peningkatan kompetensi

SASARAN 3	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional

Tabel III.xx
Capaian Kinerja Sasaran III

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
		Target	Realiasi	Capaian %		
20	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian Perencanaan dan Program yang meningkat kompetensinya	100%	100%	100%	100%	-
21	Realisasi anggaran Bagian Perencanaan dan Program	≥95%	99,4%	104,6%	95,8%	3,6%
22	Persentase pencapaian kinerja Bagian Perencanaan dan Program	90%	87%	95%	-	-
23	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal Bagian Perencanaan dan Program	100%	100%	100%	-	-
24	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal Bagian	100%	100%	100%	-	-

No	Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
		Target	Realiasi	Capaian %		
	Perencanaan dan Program					
25	Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Program	75%	75%	100%	-	-

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar % (dapat dituliskan yang tercapai 100%/di atas 100%/dibawah 100% indikator kinerja apa saja). Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

19. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian Perencanaan dan Program yang meningkat kompetensinya

ASN yang kompetensinya meningkat akan menjadi lebih efektif, lebih inovatif dan lebih produktif untuk menjadikan lembaganya lebih baik. Beberapa kegiatan untuk meningkatkan kompetensi ASN di Bagian Perencanaan dan Program antara lain berupa pelatihan, workshop, seminar atau knowledge sharing. Seluruh ASN di Bagian Perencanaan dan Program telah memperoleh pelatihan dengan rincian terlampir. Sehingga kinerja ini dapat dicapai 100%.

20. Realisasi anggaran Bagian Perencanaan dan Program

Realisasi bagian perencanaan dan program tahun 2017 di targetkan adalah 95% dari pagu anggaran Rp.4.200.005.000 dan realisasi anggaran nya sebesar 99,4% jadi capaian realisasi dari target yang ditetapkan adalah sebesar 104,6%.

24. Persentase pencapaian kinerja Bagian Perencanaan dan Program

Target Persentase pencapaian kinerja Bagian Perencanaan dan Program yaitu 90 % . Berikut realisasi yang telah dicapai :

Tabel.

Perbandingan Target dan realisasi kinerja Bagian Perencanaan dan Program

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1. Terwujudnya good governance dan clean government	1. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	73 (BB) Dokumen	-	N/A
	2. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Bagian Perencanaan dan Program	3,7 Nilai	-	N/A
2. Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel	3. Jumlah Renja Bagian Perencanaan dan Program	1 Dok	1 Dok	100 %
	4. Jumlah draft Laporan Kinerja	3 Dok	3 Dok	100 %
	5. Jumlah laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Program	1 Dok	1 Dok	100 %
	6. Jumlah draft Renja BSN 2018	1 Dok	1 Dok	100 %
	7. Jumlah draft RKAKL 2018	2 Dok	2 Dok	100 %
	8. Jumlah draft revisi RKAKL BSN 2017	4 Dok	5 Dok	80 %
	9. Jumlah draft Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2017	1 Dok	1 Dok	100 %
	10. Jumlah laporan Monev BSN Tahun 2017	16 Dok	16 Dok	100 %
	11. Jumlah laporan pelaksanaan Rapat Kerja BSN 2017	1 Lap	1 Lap	100 %
	12. Jumlah draft ADIK	1 Dok	1 Dok	100 %

	RKAKL 2018			
	13. Jumlah draft reviu Renstra BSN	1 Dok	1 Dok	100 %
	14. Jumlah draft bahan RDP Komisi VI DPR	4 Dok	4 Dok	100 %
	15. Jumlah draft bahan Nota Keuangan APBN 2018	1 Dok	1 Dok	100 %
	16. Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja akhir tahun	1 kali	1 kali	100 %
	17. Jumlah kajian perencanaan strategis	1 kajian	1 kajian	100 %
	18. Jumlah aplikasi perencanaan	2 Aplikasi	1 Aplikasi	50 %
	19. Jumlah peningkatan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran	4 kali	4 kali	100%
Total				1.650%
Rata-rata				1.650 % :19
Hasil				87 %

Berdasarkan tabel diatas, realisasi tahun 2017 sebesar 86 % artinya tercapai 95% dari target 90 % . Belum tercapai 100% karena sampai dengan saat ini KemenPAN dan RB belum menerbitkan hasil penilaian yang mengukur tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN. Sedangkan Indikator Indeks kepuasan pegawai sampai dengan saat ini masih dalam proses pengumpulan untuk perhitungannya.

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian		Persentase
		2016	2017	
Terwujudnya good governance dan clean government	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	64,87 (B)	N/A	0 %
	1. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Bagian Perencanaan dan	3,22	N/A	0 %

	Program			
Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel	Jumlah Renja Bagian Perencanaan dan Program	1 Dok	1 Dok	100 %
	Jumlah draft Laporan Kinerja	3 Dok	3 Dok	100 %
	2. Jumlah laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Program	1 Dok	1 Dok	100 %
	3. Jumlah draft Renja BSN 2018	1 Dok	1 Dok	100 %
	4. Jumlah draft RKAKL 2018	2 Dok	2 Dok	100 %
	5. Jumlah draft revisi RKAKL BSN 2017	5 Dok	5 Dok	100 %
	6. Jumlah draft Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2017	1 Dok	1 Dok	100 %
	7. Jumlah laporan Monev BSN Tahun 2017	16 Dok	16 Dok	100 %
	8. Jumlah laporan pelaksanaan Rapat Kerja BSN 2017	1 Lap	1 Lap	100 %
	9. Jumlah draft ADIK RKAKL 2018	1 Dok	1 Dok	100 %
	10. Jumlah draft reviu Renstra BSN	1 Dok	1 Dok	100 %
	11. Jumlah draft bahan RDP Komisi VI DPR	4 Dok	4 Dok	100 %
	12. Jumlah draft bahan Nota Keuangan APBN 2018	1 Dok	1 Dok	100 %
	13. Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja akhir tahun	1 kali	1 kali	100 %
	14. Jumlah kajian perencanaan strategis	1 kajian	1 kajian	100 %
	15. Jumlah aplikasi perencanaan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100 %
	16. Jumlah peningkatan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran	4 kali	4 kali	100 %

Total				1.700%
Rata-rata				1.700% : 19
Hasil				**89 %**

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan capaian 2017 terhadap 2016 sebesar 89 %. Belum tercapai 100% karena data capaian Indikator tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN dan Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Bagian Perencanaan dan Program belum tersedia.

25. **Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal Bagian Perencanaan dan Program**

    Tindak lanjut pengawasan internal sebesar 100%

26. **Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal Bagian Perencanaan dan Program**

    Tindak lanjut pengawasan internal sebesar 100%

27. **Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Program**

    Bagian Perencanaan mempunyai Aplikasi yaitu Sistem Informasi Penganggaran dan Pelaporan (SIPP)

    Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan)

    Aplikasi SIPP ini bertujuan untuk memudahkan unit kerja dalam penganggaran dan pelaporan, karna segala jenis informasi mengenai perencanaan dan pelaporan akan disajikan di aplikasi ini, sehingga unit kerja sudah tidak akan kesulitan dalam mencari data dan harus mengacu kemana dalam hal penganggaran dan pelaporan. Dalam hal penganggaran, aplikasi ini akan menyajikan data anggaran dan juga realisasi secara *updat*. Sedangkan untuk pelaporan, yang semula pelaporan ini berupa hard copy dan harus menunggu pimpinan kembali ke kantor untuk di seyujui, maka melalui aplikasi ini cukup

melalui gadget untuk membaca laporan unit kerja nya dan untuk menyetujui nya pun bisa melalui gadget tersebut.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember 2016, pagu anggaran Bagian Perencanaan dan Program TA 2017 adalah sebesar Rp.4.200.005.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.173.329.983,- sebesar 99,4%.

Pagu dan realisasi anggaran Bagian Perencanaan dan Program TA 2017 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.xx
Pagu dan Realisasi Anggaran
Bagian Perencanaan dan Program TA 2017

Dalam rupiah

Kode	Output/Komponen	2017		%
		Pagu	Realisasi	
3550.952	**Layanan Perencanaan**	**4.200.005.000**	**4.173.329.983**	**99,4%**
051	Melaksanakan Penyusunan Rencana Program	2.026.885.000	2.014.319.430	99,4%
052	Melaksanakan Penyusunan Anggaran	876.275.000	874.498.823	99,8%
053	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi	1.190.248.000	1.177.914.730	99,0%
054	Melakukan Penyusunan Laporan Kemajuan	28.498.000	28.498.000	100,0%
055	Melakukan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja	78.099.000	78.099.000	100,0%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2017 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2017 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Biro PKT.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bagian Perencanaan dan Program Tahun 2017, sebagian besar kinerja kegiatan telah/belum terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. realisasi tahun 2017 sebesar 86 % artinya tercapai 95% dari target 90 % . Belum tercapai 100% karena sampai dengan saat ini KemenPAN dan RB belum menerbitkan hasil penilaian yang mengukur tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN. Sedangkan Indikator Indeks kepuasan pegawai sampai dengan saat ini masih dalam proses pengumpulan untuk perhitungannya.

Terlaksananya kegiatan di Bagian Perencanaan dan Program-Biro PKT sangat mendukung pelaksanaan kegiatan fasilitasi lingkup Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, sesuai tugas fungsi Biro PKT sebagai fasilitasi dan koordinasi lingkup Badan Standardisasi Nasional. Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Bagian Perencanaan dan Program-Biro PKT di tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Kepala Bagian Perencanaan

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Suseno
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Program

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. Beni Nugraha
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, Februari 2017

Pihak Kedua,

M. Beni Nugraha

Pihak Pertama,

Heru Suseno

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Terwujudnya good governance dan clean government	1 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	73 (BB) Dokumen
	2 Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Bagian Perencanaan dan Program	3,7 Nilai
2 Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel	3 Jumlah Renja Bagian Perencanaan dan Program	1 Dok
	4 Jumlah Draft Laporan Kinerja	3 Dok
	5 Jumlah Laporan Kinerja Bagian Perencanaan dan Program	1 Dok
	6 Jumlah draft Renja BSN 2018	1 Dok
	7 Jumlah draft RKAKL 2018	2 Dok
	8 Jumlah draft revisi RKAKL BSN 2017	4 Dok
	9 Jumlah draft Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2017	1 Dok
	10 Jumlah laporan Monev BSN Tahun 2017	16 Dok
	11 Jumlah laporan pelaksanaan Rapat Kerja BSN 2017	1 Lap
	12 Jumlah draft ADIK RKAKL 2018	1 Dok
	13 Jumlah draft revisi Renstra BSN	1 Dok
	14 Jumlah draft bahan RDP Komisi VI DPR	4 Dok
	15 Jumlah draft bahan Nota Keuangan APBN 2018	1 Dok
	16 Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja akhir tahun	1 Kali
	17 Jumlah kajian perencanaan strategis	1 Kajian
	18 Jumlah aplikasi perencanaan	2 Aplikasi
	19 Jumlah peningkatan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran	4 Kali

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKT yang profesional	20 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Bagian Perencanaan dan Program yang meningkat kompetensinya	100 %
	21 Realisasi anggaran Bagian Perencanaan dan Program	>95 %
	22 Persentase pencapaian kinerja Bagian Perencanaan dan Program	90 %
	23 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal Bagian Perencanaan dan Program	100 %
	24 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal Bagian Perencanaan dan Program	100 %
	25 Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Program	75 %

Output	Anggaran (Rp.)
1 Layanan Perencanaan	5.000.000.000

Jakarta, Februari 2017

Pihak Kedua

M. Beni Nugraha

Pihak Pertama

Heru Suseno